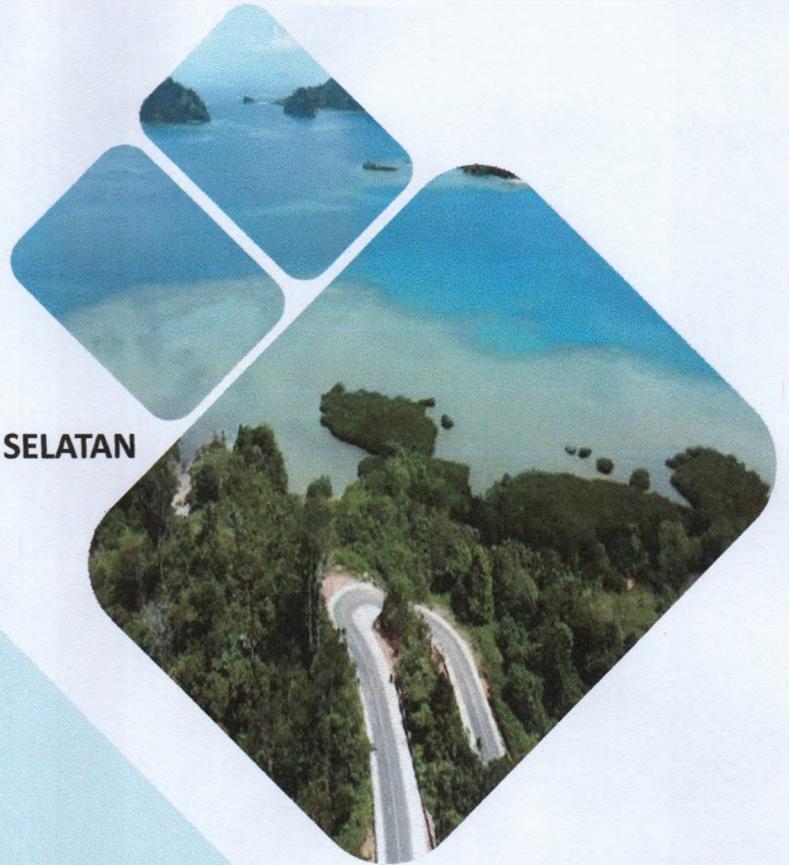




**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2022

UF Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,



**SUHENDRI, S.Pd, M.Si**

NIP. 19670723 199512 1001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I     PENDAHULUAN	3
1.1.   Latar Belakang	3
1.2.   Dasar Hukum	4
1.3.   Maksud dan Tujuan	6
BAB II    HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN	7
2.1    Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	7
2.2    Kebijakan Strategis	19
2.3    Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021	20
BAB III   CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	21
3.1    Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya Identifikasi tugas Pembantuan	21
3.2    urusan Pemerintahan           yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya	21
BAB IV    PENUTUP	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ ATA 2021 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas

oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

## **1.2. Dasar Hukum**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
  27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pada Tahun 2021 Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.504.818.803,00 dengan realisasi Rp. 12.877.698.292,00 (95,36%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	<b>A PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>4.054.495.338</b>	<b>3.889.498.591</b>	
				<b>I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Renstra 2021-2026</b>				<b>5.700.000</b>	<b>4.410.000</b>	
				1 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Terlaksananya Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (dokumen)	<i>dok</i>	<i>12 dok</i>	100%	<i>5.700.000</i>	<i>4.410.000</i>	
				<b>II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terbayarlah Gaji dan Tunjangan ASN	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<b>3.188.095.036</b>	<b>3.070.926.705</b>	
				1 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>3.090.895.036</i>	<i>2.975.876.705</i>	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>97.200.000</i>	<i>95.050.000</i>	
				<b>II Administrasi Kepegawaian</b> <b>I Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>bulan</i>	<i>-bulan</i>				
				1 <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Pegawai (orang)	<i>orang</i>	<i>orang</i>				
				2 <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Aparatur yang mendapat Bimbingan Teknis (orang)	<i>orang</i>	<i>orang</i>				
				<b>IV Administrasi Umum</b> <b>Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)</b>	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<b>100%</b>	<b>284.725.142</b>	<b>278.731.600</b>	
				1 <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>14.471.490</i>	<i>14.471.000</i>	
				2 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>62.978.392</i>	<i>58.523.000</i>	
				3 <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>40.389.980</i>	<i>40.367.400</i>	
				4 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>29.860.280</i>	<i>29.860.200</i>	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan Kantor (bulan)	bulan	12 bulan	100%	1.800.000	1.800.000	
				6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Makanan dan Minuman Tamu/Rapat Kantor (bulan)	bulan	12 bulan	100%	18.000.000	18.000.000	
				7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Operasional Rapat-Rapat Dalam dan Luar Daerah (bulan)	bulan	12 bulan	100%	117.225.000	115.710.000	
				<b>V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>51.916.700</b>	<b>50.411.100</b>	
				1 Pengadaan Mebel	Ketersediaan Mebeler (bulan)	bulan	12 bulan	100%	51.916.700	50.411.100	
				<b>VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>212.597.700</b>	<b>193.539.306</b>	
				1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Kantor (bulan)	bulan	12 bulan	100%	74.987.550	55.929.306	
				2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan umum kantor (bulan)	bulan	12 bulan	100%	137.610.150	137.610.000	
				<b>VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpelihara Barang Milika Daerah (bulan)</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>311.460.760</b>	<b>291.479.880</b>	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>254.160.760</i>	<i>236.427.880</i>	
				2 <i>Pemeliharaan Mebel</i>	Terperiharanya Mebeler Kantor (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	
				3 <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Terperiharanya Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>16.800.000</i>	<i>14.795.000</i>	
				4 <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Terperiharanya Gedung Kantor (bulan)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>33.000.000</i>	<i>32.757.000</i>	
				<b>B PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>					<b>810.950.900</b>	<b>803.843.690</b>	
				<b>I Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Keg. Pemuda Pelopor dan Pembentukan Paskibra Kab. Pessel</b>	<b><i>bulan</i></b>	<b><i>12 bulan</i></b>	<b>100%</b>	<b>810.950.900</b>	<b>803.843.690</b>	
				1 <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor</i>	Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pealopor Keamanan Lingkungan (orang)	<i>orang</i>	<i>40 orang</i>	100%	<i>61.000.000</i>	<i>61.000.000</i>	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terbentuknya Tim Paskibra Kab. Pessel (orang)	orang	73 orang	100%	749.950.900	742.843.690	
				<b>C PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>					<b>919.456.730</b>	<b>902.682.480</b>	
				<b>I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan olahraga</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>784.099.880</b>	<b>780.710.140</b>	
				1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (paket)	paket	5 paket	100%	784.099.880	780.710.140	
				<b>II Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Telaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>orang</b>	<b>orang</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
				1 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	orang	10 orang	100%	50.000.000	50.000.000	
				<b>II Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Telaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>85.356.850</b>	<b>71.972.340</b>	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Bantuan Sarana Olahraga di Kec. (paket) dan Terlaksananya Bantuan untuk Club olahraga di Kab. Pessel (club)	club	15 club	100%	85.356.850	71.972.340	
2	Urusan Kepariwisataan	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	<b>D PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>					<b>6.733.583.525</b>	<b>6.331.896.561</b>	
				<b>I Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Objek Wisata</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>147.247.990</b>	<b>144.975.990</b>	
				1 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek wisata unggulan yang dikembangkan (paket) dan Jumlah Output Peningkatan Tata kelola PHJD Bid. Pariwisata	paket	1 paket	100%	147.245.990	144.975.990	
				<b>II Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>6.586.335.535</b>	<b>6.186.920.571</b>	
				1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Tata kelola PHJD Bidang Pariwisata (bulan)	output	10 Output	100%	571.449.950	462.013.385	
				2 Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah Objek wisata yg dipelihara (kali) 2. Jumlah Sarana Prasarana yg dibangun (paket) 3. Sarana dan Prasarana Objek wisata yg dibangun (paket)	paket	3 paket	100%	5.580.183.395	5.312.302.172	
				3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya 100% pengawasan dan Monitoring Objek Wisata dan Terlaksananya Operasional Pengelolaan Objek Wisata (bulan)	bulan	12 bulan	100%	434.702.190	412.605.014	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Kepariwisata (paket)	paket	- Paket				
				<b>E PEMASARAN PARIWISATA</b>					<b>4.751.000</b>	<b>4.748.500</b>	
				<b>I Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>4.751.000</b>	<b>4.748.500</b>	
				1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Video Promosi yang dibuat (Kali)	kali	- kali	100%	4.751.000	4.748.500	
				<b>F PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>					<b>981.583.310</b>	<b>945.028.470</b>	
				<b>I Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>981.583.310</b>	<b>945.028.470</b>	
				1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terfasilitasnya proses kreasi, produksi, distribusi dan konsumsi Ekonomi Kreatif (bulan)	bulan	12 bulan	100%	248.650.850	244.700.950	
				2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terfasilitasnya Pengembangan Sumbersaya Manusia Ekonomi Kreatif (bulan)	bulan	12 bulan	100%	369.676.290	344.672.850	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 <i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<i>konten Video</i>	<i>15 Konten</i>	100%	314.932.700	310.095.500	
				4 <i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<i>cinderamata</i>	<i>300 lembar</i>	100%	48.323.470	45.559.170	
									<b>13.504.820.803</b>	<b>12.877.698.292</b>	<b>95,356</b>

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Prog. Pemasaran Pariwisata Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Wisatawan (Orang)	1.000.000	344.297	34,43%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Prog. Pemasaran Pariwisata Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Lama tinggal Wisatawan (Hari)	1.25	1,25	100%
2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prog. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Prog. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Orang)	10	10	100%

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

**a. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan (Target Kinerja : 1.000.000 Orang)  
(Realisasi Kinerja : 344.297 Orang)**

**Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Target Kinerja : 1,25 Hari)  
(Realisasi Kinerja : 1,25 Hari)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
  - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
  - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
  - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
  - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan objek wisata.
  - (2) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan output terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

**b. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing**

**Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Target Kinerja : 10 Orang) (Realisasi Kinerja : 10 Orang)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
  - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
  - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
  - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
  - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - (1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya keg. pemuda pelopor dan pembentukan paskibra Kab. Pessel.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga.
  - (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan output telaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.
  - (3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan output telaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

#### - **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

##### a. **PERMASALAHAN**

Pada tahun 2021 kunjungan wisatawan yang datang ke Pesisir Selatan mengalami kenaikan lebih 2x lipat dari pada tahun sebelumnya, yakni 177.283 pengunjung pada tahun 2020 menjadi 344.247 pengunjung. Itu semua berasal dari wisatawan lokal sedangkan kunjungan wisatawan manca negara tidak ada karena adanya pembatasan kebijakan perjalanan ke luar negeri oleh negara yang bersangkutan. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mengakui bahwa kurangnya promosi dan iven/ kegiatan pariwisata yang mengundang wisatawan berkunjung ke Pesisir Selatan.

##### b. **SOLUSI**

Disarankan kedepannya untuk menggiatkan kembali promosi dan iven pariwisata dengan harapan juga tidak ada kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat sebagai akibat dampak penyebaran Covid-19.

## 2.2 Kebijakan Strategis

**Tabel 2.2**  
**Kebijakan Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Menetapkan kelompok/komunitas wisata dan atau ekonomi kreatif melalui Surat Keputusan Kepala Dinas	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 556/27/KPTS/DPPO-PS/2021 tentang Pengukuhan Komunitas Wisata Kuliner Pasisia	Menunjuk salah satu komunitas/kelompok wisata yakni Komunitas Wisata Kuliner Pasisie (KWKP) menjadi mitra dalam kegiatan pariwisata yang ada pada Pusat Informasi Pariwisata (TIC) di Carocok Anau sekaligus menjadi pengelola Galeri Oleh2 pada fasilitas tersebut.
2	Membentuk forum tata kelola pariwisata dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan	Amandemen 3 Manual Manajemen Program (Program Management Manual/PMM) Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), Output PHJD Bidang Pariwisata Tahun II Tahap I	Untuk membantu mengatasi persoalan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum
3	Menetapkan 16 Desa Wisata dengan Keputusan Bupati	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:556/16/Kpts/BPT-PS/2021	Guna diarahkan untuk pengembangan pariwisata ke depan serta mendukung program pemerintah provinsi dan pusat
4	Melakukan pembebasan lahan objek wisata Air Terjun Timbulun	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 556/703/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Objek Wisata Air Terjun Timbulun Painan di Kecamatan IV Jurai	Untuk dikembangkan dan dibangun sarana dan prasarana

### 2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020

**Tabel 2.3**  
**Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**  
**Akhir Tahun Anggaran 2020**

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian secara menyeluruh dan komprehensif untuk percepatan pengelolaan objek wisata pantai carocok melalui pihak ketiga.	Melalui FTKP telah dibahas Bersama terkait upaya Pengelolaan Kawasan Pantai Carocok Painan kepada pihak ketiga diantaranya telah disusun bisnis plan tentang pengelolaan Kawasan pantai carocok oleh pihak ketiga sesuai arahan dari BPKD.	Upaya membuat perda tentang perusda yang akan mengelola Kawasan Pantai carocok
2	Event-event kepariwisataan yang sudah dikenal Tingkat Nasional maupun Internasional agar dilaksanakan kembali untuk mendorong minat wisatawan berkunjung ke Pesisir Selatan.	Setuju, karena melalui event-event pariwisata Pesisir Selatan dan wisatawan kembali berkunjung ke Pesisir Selatan.	Mengusulkan event-event melalui kalender event Provinsi dan Nasional
3	Diminta kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang lebih difokuskan pada oleh-oleh khas Pesisir Selatan terutama kuliner khas yang ada di nagari-nagari, agar merek diberi ruang dan peluang untuk dipromosikan.	Dengan melantik Komunitas Wisata Kuliner Pesisir Selatan yang bertujuan menunjang Pariwisata Pesisir Selatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.	SK KWKP
4	Gedung gulat yang dipakai oleh Akademi Komunitas agar dikembalikan ke Gedung gulat sebagai cabang olahraga prestasi di Pesisir Selatan.	Telah dikomunikasikan dengan akademi komunitas sebagai upaya pengembalian Gedung gulat kepada fungsi sebagaimana mestinya.	Upaya pengalihan asset ke Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**3.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA**

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

**3.2. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA**

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Painan, Januari 2022

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,



**SUHENDRI, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19670723 199512 1001